



International Conference on Theology, Religion, Culture, and Humanities
Re Imagining Theology, Religion, Culture, And Humanities for Public Life
<https://e-conf.usd.ac.id/index.php/theoicon/>
Faculty of Theology, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

A Culture Of Encounter As A Response To Identitarian Populism In Pluralistic Indonesia

Anita Anastasya Br Sembiring

Anita Stephanie F. Warow

Antonius Bagas Prasetya Adi Nugraha

Erni Dameria Simare-mare

Paulus Bambang Irawan SJ

Program Pascasarjana Filsafat Keilahian-Universitas Sanata Dharma

Abstract

Populism is an urgent problem in modern democratic contestation. Frederico Tarragoni, a French sociologist, says that populism is not only identitarian but also plebeian. For Tarragoni, an identitarian populism has nationalist and xenophobic tendencies, a society that feels its identity is clear and fears foreigners. Meanwhile, plebeian populism is a movement that forms people for a certain purpose through a project; for example, a group of people who gather because they are united by a group of anti-corruption social activists and then fight against oligarchic domination. Populism becomes an actual problem because (1) populism unites several political projects such as cities and villages, right and left camps; (2) populism can be said to be a project to fight for the people; (3) populism can be a weapon of political struggle and this can be utilized by the ruling class in a country.

Populism is also pervasive in the context of diversity in Indonesia. In Indonesia itself, populism mostly leads to identitarian populism, which if not careful will cause friction between groups of people. Identities

that are only formed on one element (e.g. religion, ethnicity) often trigger conflicts between the majority and minority. From the majority's point of view, they create a crisis of convergence, a crisis that is deliberately created to divide society in order to fulfill the hidden goals of certain groups. In reality, identities are plural.

In this context, the Church is challenged to make contributions by opening up the narrowness of a singular identitarian populist perspective through a culture of encounter. As written in *Fratelli Tutti* "a culture of encounter means that we, as a society, should be more eager to meet others, to find common ground, to build bridges, to plan a project that involves everyone." (FT, 216). The culture of encounter should not remain as something abstract and needs to be realized in daily life. The culture of encounter is made concrete through interfaith dialogues and various programs such as live-ins or exposures at catholic schools so that everyone knows each other.

Keywords: *Populisme, Populisme Identitarian, Dialog, Budaya Perjumpaan.*

Pendahuluan

Populisme merupakan permasalahan mendesak dalam kontestasi demokrasi modern. Frederico Tarragoni, seorang sosiolog dari Perancis, mengatakan bahwa populisme itu bukan hanya bersifat identitarian melainkan juga plebeian.¹ Menurutnya populisme identitarian adalah cara pandang yang nasionalis dan *xenophobic*, masyarakat yang merasa identitasnya sudah jelas dan takut terhadap orang asing. Sedangkan populisme plebeian adalah gerakan yang membentuk rakyat untuk sebuah tujuan tertentu melalui sebuah proyek; misalnya sekelompok rakyat yang berkumpul karena disatukan oleh sekelompok aktivis sosial anti korupsi dan kemudian berjuang menentang dominasi oligarki.

Populisme ternyata juga merasuk dalam konteks keberagaman di Indonesia. Meskipun begitu populisme identitas di Indonesia dapat dibagi menjadi dua bagian yakni populisme Negatif dan Positif. Populisme Negatif tidak jarang dikenal sebagai politik identitas yakni usaha menegakkan atau memperjuangkan pengakuan atas identitas yang sedang diperjuangkan, hal ini dapat dilihat dari kontroversi yang bangun oleh Partai Ummat yang menegaskan partainya mengusung politik identitas, Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi menyatakan bahwa politik yang baik itu harus mempunyai

¹ Gregor Fitz, Jürgen Mackert, and Bryan S. Turner, eds., *Populism and the Crisis of Democracy: Volume 1: Concepts and Theory*, 208AD, accessed March 11, 2023, <https://www.taylorfrancis.com/books/9781351608985>.

pendasaran yang jelas. yakni pendasaran ajaran moral dari Agama itu sendiri yakni Agama Islam. Hal ini diprotes keras oleh Badan Pemilihan umum (Bawaslu) yang dengan keras menyatakan bahwa Indonesia memiliki beragam Agama, sehingga tidak patut untuk saling meniadakan sehingga tidak ada partai yang boleh menggunakan politik identitas.² Populisme Positif dapat disebut sebagai Populisme Plebeian. Populisme Plebeian merupakan gerakan yang membentuk rakyat dengan project, misalnya mahasiswa yang mengacak-acak undang-undang korupsi. Hal ini dilakukan karena ingin menyelamatkan negara Indonesia dari lemahnya reformasi, demokrasi, dan pemberantasan korupsi.³ Identitas yang hanya dibentuk pada satu unsur saja (misalnya agama, kesukuan) seringkali memicu konflik mayoritas dan minoritas. Dari sudut pandang mayoritas, mereka menciptakan krisis konvergensi yaitu krisis yang sengaja diciptakan untuk memecah belah masyarakat demi memenuhi tujuan terselubung golongan tertentu.

Dalam konteks ini, Gereja Katolik ditantang untuk mengambil peran dengan membuka kesempatan cara pandang populisme identitarian yang tunggal lewat budaya perjumpaan. Hal ini dituliskan dalam *Fratelli Tutti* bahwa “budaya perjumpaan berarti bahwa kita, sebagai masyarakat, hendaknya lebih bersemangat untuk berjumpa orang lain, mencari titik temu, membangun jembatan, perencanaan suatu proyek yang melibatkan semua orang.” (FT, 216). Budaya perjumpaan itu tidak boleh tinggal sebagai sesuatu yang abstrak melainkan dan perlu diwujudkan dalam kehidupan.

Metode

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (*library research*), Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2003:3). Dalam penelitian studi pustaka setidaknya ada empat ciri utama yang perlu diperhatikan oleh penulis: Pertama, bahwa penulis atau peneliti berhadapan langsung dengan teks (nash) atau data angka, bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan. Kedua, data pustaka bersifat “siap pakai” artinya peneliti tidak terjun langsung ke lapangan karena peneliti berhadapan langsung dengan sumber data yang ada di perpustakaan. Ketiga, bahwa data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan atau data dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari data

² Tim Detikcom, “Partai Ummat ‘kami Politik Identitas’ Bikin Bawaslu Beri Protes Keras,” *Detiknews* (Jabodetabek, February 21, 2023), <https://news.detik.com/pemilu/d-6579919/partai-ummat-kami-politik-identitas-bikin-bawaslu-beri-protos-keras>.

³ Muchammad Abdul Ghofur and Herru Prasetya Widodo, “Demonstrasi Mahasiswa ‘Tolak Reformasi Dikorupsi’ dalam Agenda Media Tirto.ID,” *Komunida: Media Komunikasi dan Dakwah* 11, no. 01 (April 2021): 13–28.

pertama di lapangan. Keempat, bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu (Zed, 2003:4-5).⁴ Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, maka pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menelaah dan/atau mengeksplorasi beberapa Jurnal, buku, dan dokumen-dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun elektronik) serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian atau kajian.

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Populisme dalam Konteks Keberagaman Indonesia

Populisme selalu berbicara atas nama rakyat dan menantang berbagai “elite”. Pengertian rakyat dapat merujuk pada orang biasa, terutama yang miskin dan tidak berpendidikan. Bisa juga merujuk pada rakyat merdeka sebagai demonstran, merujuk pada orang-orang yang dibatasi atau berbeda secara budaya atau etnis.⁵ Populisme selalu berada dalam dua ekstrim yang berbeda. Frederico Tarragoni menyampaikan dua jenis populisme, yaitu populisme identitarian dan populisme plebeian. Populisme identitarian adalah populisme nasionalis dan mudah terjatuh pada xenofobia karena identitas diandaikan dari orang-orang yang “sudah ada” dan terbentuk sebagai suatu kelompok yang jelas. Misalkan berdasarkan suku, ras, dan agama tertentu. Sementara populisme plebeian adalah populisme yang sengaja “dibuat” atau “diciptakan” untuk suatu perjuangan tertentu. Populisme plebeian muncul dari kelompok orang yang selama ini dikucilkan dari politik atau kekuasaan, tumbuh dari perjuangan melawan eksploitasi dan penindasan.⁶

Populisme identitarian telah masuk ke dalam konteks keberagaman Indonesia. Hal ini terungkap dengan adanya kelompok - kelompok tertentu yang memiliki nasionalisme sempit terhadap bangsa. Nasionalisme di satu sisi memang perlu namun akan berbahaya apabila terlalu eksklusif atau membatasi diri pada kelompok tertentu saja. Sikap eksklusif dari kelompok atau golongan tertentu melahirkan populisme identitarian, dalam konteks keberagaman Indonesia dapat terjadi melalui pandangan nasionalisme sempit yang berujung pada krisis identitas sebagai suatu bangsa yang beragam, di mana kelompok mayoritas merasa memiliki kekuatan lebih besar dan merasa eksklusif dibandingkan kelompok-kelompok minoritas. Sikap eksklusif ini mengarah pada populisme eksklusivisme di mana populisme ini bertentangan dengan

⁴ Supriyadi Supriyadi, “Community of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan antar Pustakawan,” *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan* 2, no. 2 (February 23, 2017): 83.

⁵ Rogers Brubake. (2019). *Populism and The Crisis of Democracy: Why Populism?*, 28.

⁶ Cathérine Colliot-Thélène. *Populism As a Conceptual Problem*, 21.

tujuan dari komunitas politik kristiani yaitu kesejahteraan bersama dan keadilan.⁷ Rakyat menolak populisme eksklusivisme dengan alasan bahwa kelompok-kelompok eksklusif ini telah kehilangan jati diri mereka sebagai bangsa yang beragam.

Populisme bisa berciri inklusif ketika diarahkan pada kesadaran akan suatu bangsa yang beragam dan tidak berhenti pada pandangan sempit dan sikap eksklusif. Maka diperlukan suatu kesadaran tentang makna kesetaraan dan budaya perjumpaan. Dalam tradisi Kristen kesetaraan ini didasarkan pada pemahaman bahwa semua orang setara di hadapan Allah sebab manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (Kej. 1:27) dan dalam Galatia 3:28 disebutkan bahwa semua orang Yahudi, Yunani, pria, wanita, hamba, dan orang berdosa adalah satu di dalam Kristus. Dengan pernyataan tersebut dan kesadaran sebagai kelompok manusia yang berpijak di bumi yang sama, mestinya tidak ada lagi sikap eksklusif sebagai satu kelompok mayoritas saja. Adapun, dengan kesetaraan dan harapan akan kesadaran yang melahirkan sikap inklusif yang mengarahkan kelompok-kelompok pada keterbukaan untuk berdialog dan melahirkan proyek kehidupan bersama untuk merajut kebhinekaan demi tujuan bersama yaitu kesejahteraan bersama dan keadilan.⁸

2. Teologi Rakyat Ala Paus Fransiskus Sebagai Sumbangan Terhadap Populisme Plebeian

Populisme awalnya menjadi gerakan yang muncul di masyarakat untuk memperhatikan komunitas lokal. Akan tetapi yang muncul adalah gerakan yang sangat sentral pada orang-orang terdekat dan memiliki kesamaan. Jika kesamaan itu muncul pada ranah politik atau golongan kepentingan elit, hal tersebut akan menyebabkan perpecahan di dalam suatu masyarakat. Populisme ini adalah populisme identitarian. Sedangkan di sisi lain ada populisme plebeian yang menghimpun massa untuk membangun gerakan solidaritas yang bermanfaat untuk rakyat.

Populisme sebagai gerakan untuk memperjuangkan keadilan bukanlah sebuah isu profan yang terlepas dari misi Gereja. Keadilan yang diperjuangkan merupakan elemen konstitutif dari misi gereja. Dalam dokumen *Justice in the World* dinyatakan bahwa tindakan atas nama keadilan dan partisipasi dalam transformasi dunia sepenuhnya tampak bagi kita sebagai dimensi konstitutif dari pewartaan Injil atau dimensi Gerejani. Tindakan atas nama keadilan adalah hal yang fundamental bagi kehidupan dan misi gereja, bukan sekedar deduksi konsekuensial.⁹ Gereja harus terlibat aktif dan membantu

⁷ Jonathan Chaplin. *A Political Theology of 'The People': Enlisting Classical Concepts for Contemporary Critique*. Koninklijke Brill NV, Leiden, 2022, 230.

⁸ Jonathan Chaplin. *A Political Theology of 'The People': Enlisting Classical Concepts for Contemporary Critique*. Koninklijke Brill NV, Leiden, 2022, 240.

⁹ Martin Owchorchukwu Ejiowhor, Pope Francis's Culture of Encounter as a Paradigm Shift in the Magisterium's Reception of *Justice in the World*: Implications for the Church's Social Mission?, *Journal of Catholic Social Thought*, January, 2021: 1-4

mereka yang mengalami ketidakadilan. Bukan tentang apakah dia anggota Gereja, apakah dia saudara kita, tetapi setiap orang pada dirinya dibebankan tanggung jawab dan kewajiban untuk membantu orang lain dalam situasi sulit. Agustinus dan Thomas Aquinas menegaskan kewajiban kristiani untuk mengasihi semua manusia sebagai sesama. Dan prinsip *Kew Garden* menyatakan bahwa setiap manusia memiliki kewajiban untuk menolong orang terdekat yang sedang berada dalam kesulitan.

Paus Fransiskus melalui dokumen *Fratelli Tutti* membahas populisme sebagai bahasan teologis. Paus dengan mengacu pada perumpamaan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati, menyoroti pentingnya perjumpaan nyata dengan orang lain. Melalui perjumpaan orang disadarkan akan martabat dan kebutuhan orang yang dijumpai. Setiap orang saling bertemu dalam realitasnya sendiri, bebas dari penilaian berdasarkan latar belakang, ide, konsep dan lain sebagainya. Menurut Paus realitas lebih penting dari ide. Oleh karena itu bukan tentang identitas apa yang dibawah oleh orang yang dijumpai, melainkan realitas dia dalam martabatnya sebagai manusia yang hadir kini dan di sini yang lebih penting. Oleh karena itu, bukan tentang perjuangan identitas, melainkan tentang apa yang dibutuhkan sebagai kepentingan bersama.

Dalam perjumpaan ini terjadi keterlibatan timbal balik antara dua orang sebagai bentuk transendensi diri. Untuk menjumpai orang lain, setiap orang harus mampu menjangkau, melampaui atau mentransendensikan dirinya sendiri dalam menghargai realitas yang dihadapinya. Melampaui batas-batas sempit diri sendiri dapat terjadi ketika seseorang mengenal orang lain sebagaimana adanya, ketika seseorang masuk ke dalam hubungan yang menghormatinya. Hal sama juga terjadi kepada orang yang ditemuinya. Oleh karena itu perjumpaan merupakan pertemuan dua makhluk transenden-diri yang memiliki karakteristik spiritual yang menjadikan mereka lebih dari sekedar benda. Bentuk-bentuk transendensi diri ini merupakan penanda martabat dan harga diri seseorang. Mereka adalah alasan mengapa orang harus dihormati dan dilindungi oleh orang lain dalam interaksi manusia. Norma-norma khusus tentang bagaimana manusia harus memperlakukan satu sama lain adalah ekspresi yang lebih rinci dari kebutuhan untuk menghormati transendensi diri pribadi manusia. Menghormati transendensi diri seseorang berarti menghargai kemampuannya untuk mengetahui, membuat pilihan dalam kebebasan dan membentuk ikatan hubungan dan cinta. Demikian pula, orang mampu mengalami kewajiban untuk menunjukkan rasa hormat tersebut justru karena orang kedua juga memiliki kapasitas transendensi diri. Orang kedua ini tidak terkurung dalam batas-batas kesadaran dirinya, tetapi dapat secara tulus menghadapi orang lain sebagai sesama manusia. Dalam perjumpaan seseorang secara konkret membangkitkan martabat orang lain dan merespon dengan cara yang dapat mengarah pada kerja sama timbal balik

Paus menekankan bahwa perjumpaan memiliki manifestasi utamanya dalam interaksi antarpribadi yang mencapai kepenuhannya dalam cinta satu orang kepada yang lain. Perjumpaan ini dapat terjadi secara komunal ketika satu komunitas terlibat secara positif dengan komunitas lain dan mengakui nilai dan hak komunitas lain. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan keadilan dan perdamaian di dalam komunitas dan antar bangsa di tingkat global. Ketika perjumpaan komunal ini terjadi, hal ini dapat mengarah pada apa yang disebut Fransiskus sebagai “persahabatan sosial”. Hal ini juga akan berdampak pada institusi politik yang mengarah pada apa yang dilihat Paus sebagai pendalaman “cinta politik”. Dimensi sosial dari perjumpaan antara orang dan komunitas akan memacu tindakan “untuk menciptakan institusi yang lebih baik, peraturan yang lebih adil, struktur yang lebih mendukung”. Mereka akan mempromosikan perkembangan dari apa yang disebut Paus sebagai “budaya perjumpaan”¹⁰

Paus Fransiskus menyatakan bahwa Kelompok populis yang tertutup mendistorsi kata “bangsa”, karena pada kenyataannya yang mereka bicarakan bukanlah bangsa yang sesungguhnya. Sebenarnya, konsep “bangsa” itu terbuka. Bangsa yang hidup dan dinamis dengan masa depan adalah bangsa yang selalu tetap terbuka terhadap sintesis-sintesis baru, dengan menerima apa yang berbeda. Itu dilakukannya bukan dengan menyangkal dirinya sendiri, melainkan dengan kerelaan untuk digerakkan, dipertanyakan, diperluas, diperkaya oleh orang lain, dan dengan demikian bisa berkembang (FT. 160). Menurut Paus, yang dapat membentuk populisme secara sehat adalah kasih. Kasih sejati mampu mencakup semua itu dalam dedikasinya. Bila kasih harus menyatakan dirinya dalam perjumpaan dari orang-ke-orang, ia juga mampu menjangkau saudara-saudari yang jauh dan bahkan yang terabaikan, melalui berbagai sumber yang dapat dihasilkan oleh lembaga-lembaga masyarakat yang teratur, bebas, dan kreatif. Dalam kasus ini, juga orang Samaria yang murah hati membutuhkan suatu penginapan yang dapat memberi bantuan yang secara pribadi tidak mampu ia tawarkan. Kasih terhadap sesama itu realistis dan tidak menyalahkan apa pun yang diperlukan untuk suatu perubahan sejarah demi kebaikan orang-orang yang paling kecil (FT. 165)

3. Sinodalitas Antaragama Terlebih dengan Umat Muslim

Budaya perjumpaan dan dialog tidak akan berhasil tanpa setiap orang memahami agamanya masing-masing. Bagi Paus Fransiskus, dasar dari sebuah dialog adalah adanya pemikiran yang tidak lengkap (*incomplete thinking*) dan empati. Kedua hal tersebut berperan besar. 'Pemikiran yang tidak lengkap' membutuhkan cara untuk melihat dan merefleksikan realitas yang harus terbuka, fleksibel, kreatif, murah hati, dan tidak pernah

¹⁰ David Hollenbach, SJ, “Religious Nationalism, a Global Ethic, and the Culture of Encounter”, *Theological Studies* 83:3, 2022, 374-377

lelah untuk mencari. Pemikiran yang tidak lengkap adalah sikap yang membutuhkan cakrawala, yang tidak dapat dijangkau, membuat pencari sejati tak henti-hentinya dikejutkan oleh penemuan-penemuan baru dan, pada saat yang sama, gelisah di depan jurang yang dalam.¹¹ Empati sendiri dibutuhkan karena sebagai sikap dasar untuk membuat proses dialog yang efektif. Di sinilah letak nilai empati yang memungkinkan setiap mitra yang terlibat dalam dialog untuk membuka diri kepada yang lain sambil sepenuhnya cara berpikir, cara percaya, dan cara hidupnya. Pendekatan melalui empati memungkinkan dialog yang benar-benar manusiawi di mana kata-kata, ide, dan pertanyaan muncul dari pengalaman persaudaraan dan kemanusiaan bersama.¹²

Paus Fransiskus melalui jalan yang panjang ketika harus membangun dialog dengan umat Muslim. Perjalanan itu bukanlah langkah jejak yang mulus melainkan berliku sampai akhirnya ia bisa menerbitkan dokumen *Fratelli Tutti* dan juga dokumen *Abu Dhabi*. Kesadaran akan adanya kesamaan, sekali lagi, tidak menghalangi Paus untuk mengatakan kata-kata yang jelas dan tegas menentang penyalahgunaan agama. Dokumen *Abu Dhabi* ini merupakan undangan terbuka bagi umat Islam dan Kristen untuk bekerja sama dalam mendidik generasi baru, mempromosikan hak asasi manusia, serta melestarikan, membela, dan menghormati tempat-tempat suci. Pria dan wanita beriman yang mengikuti tradisi Kristen dan Muslim, pada kenyataannya, dipanggil untuk sebuah misi dan dakwah yang plural untuk menjadi 'saksi bersama'. Proses ini menuntut adanya pemeriksaan ulang terhadap teologi masing-masing.¹³

Kesimpulan

Populisme sebagai perkembangan dari demokrasi telah banyak mengubah tata kelola sebuah bangsa. Dalam pandangan Tarragoni, populisme tidak boleh berhenti pada populisme identitarian semata melainkan perlu ada populisme plebeian. Artinya membangun komunitas lokal itu penting, tetapi tetap perlu terbuka dengan orang lain yang berada di luar komunitasnya. Selain itu tujuan dan kepentingan yang diperjuangkan adalah martabat manusia dan keadilan bukan hanya kepentingan sekelompok orang saja. Sepakat dengan itu, Gereja Katolik melalui dokumen *Justice in the World* juga menegaskan bahwa tujuan Gereja hadir di dunia adalah membawa keadilan dan belas kasih. Melalui Paus Fransiskus, terlebih dalam dokumennya *Fratelli Tutti*, kita semua diminta untuk membangun budaya perjumpaan dan mengedepankan dialog kehidupan. Secara khusus

¹¹ Roberto Catalano, "Pope Francis' Culture of Dialogue as Pathway to Interfaith Encounter: A Special Focus on Islam", *Religions* 13: 279, 2002, <https://doi.org/10.3390/rel13040279>, 10.

¹² Roberto Catalano, "Pope Francis' Culture of Dialogue as Pathway to Interfaith Encounter: A Special Focus on Islam", 11.

¹³ Roberto Catalano, "Pope Francis' Culture of Dialogue as Pathway to Interfaith Encounter: A Special Focus on Islam", 15.

Paus meminta supaya kita membangun jembatan dan berjalan bersama dengan umat Muslim untuk membangun keadaban di dunia yang semakin tercerai berai oleh kekerasan ini. Indonesia dengan kebhinekaannya perlu terus mewujudkan semangat membangun jembatan perdamaian dan keadilan itu dengan berdialog dan membangun sinodalitas antaragama dan kepercayaan.

Referensi:

- Catalano, Roberto. "Pope Francis' Culture of Dialogue as Pathway to Interfaith Encounter: A Special Focus on Islam". *Religions* 13: 279. 2002. <https://doi.org/10.3390/rel13040279>
- Fitzi, Gregor, Jürgen Mackert, and Bryan S. Turner, eds.. *Populism and the Crisis of Democracy: Volume 1: Concepts and Theory*, 2023, accessed March 11 (2023) <https://www.taylorfrancis.com/books/9781351608985>.
- Abdul Ghofur, Muhammad and Herru Prasetya Widodo. "Demonstrasi Mahasiswa 'Tolak Reformasi Dikorupsi' dalam Agenda Media Tirto.ID," *Komunida : Media Komunikasi dan Dakwah* 11, no. 01 (April 2021)
- Supriyadi, Supriyadi. "Community of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan antar Pustakawan," *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan* 2, no. 2 (February 23, 2017)
- Colliot-Thélène, Catherine. *Populism as a conceptual problem: Volume 1: Concepts and Theory* (2018).
- Jonathan Chaplin. *A Political Theology of 'The People': Enlisting Classical Concepts for Contemporary Critique*. Koninklijke Brill NV, Leiden (2022)
- Hollenbach, SJ, David. "Religious Nationalism, a Global Ethic, and the Culture of Encounter", *Theological Studies* 83:3 (2022)
- Owhorchukwu Ejiowhor, Martin. Pope Francis's Culture of Encounter as a Paradigm Shift in the Magisterium's Reception of *Justice in the World*: Implications for the Church's Social Mission?, *Journal of Catholic Social Thought*, January (2021)

